

Kerja Sama Indonesia-Australia Dalam Mewujudkan Visi International Maritime Organization (IMO) Dalam Merealisasikan Laut Bersih

Ery Tri Januarasi

Universitas Hasanuddin

Agus Salim Burhanuddin

Universitas Hasanuddin

Korespondensi penulis: erijanuarsi@gmail.com

Abstract. To realize one of the visions of the International Maritime Organization (IMO), Indonesia and Australia have collaborated in this research. The close relationship between the two countries in the field of maritime security has encouraged maritime cooperation initiatives from Indonesia to Australia, which is based on awareness of its potential importance for Indonesia-Australia maritime security. This research uses qualitative methods, which aim to in-depth understanding of the problems discussed. Data collection was carried out through a literature study that examined various data sources relevant to the problem. This research is descriptive in nature, prioritizing analysis and in-depth understanding of the problems discussed. Bilateral cooperation between the two countries is directed towards their respective national interests, especially in the context of the International Maritime Organization (IMO). Through the "Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action" between Indonesia and Australia, comprehensive cooperation was built to address various maritime issues in the Indo-Pacific region, including the maritime borders of Indonesia and Australia as well as marine environmental problems. One of the important points in the Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action meeting was the commitment of the Indonesian and Australian Governments to develop an action plan to support the realization of goals, especially the issue of environmental pollution.

Keywords: Indonesia-Australia, IMO, UN, Plan of Action, Clean Marine Environment

Abstrak. Untuk mewujudkan salah satu visi International Maritime Organization (IMO), Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama dalam penelitian ini. Hubungan erat antara kedua negara dalam bidang keamanan maritim telah mendorong inisiatif kerja sama kemaritiman dari Indonesia kepada Australia, yang didasari kesadaran akan potensi pentingnya untuk keamanan laut Indonesia-Australia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendalami pemahaman mengenai permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meneliti berbagai sumber data yang relevan dengan permasalahan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif, mengutamakan analisis dan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dibahas. Kerjasama bilateral antara kedua negara ini diarahkan untuk kepentingan nasional masing-masing, terutama dalam konteks International Maritime Organization (IMO). Melalui "Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action" antara Indonesia dan Australia, kerja sama komprehensif dibangun untuk mengatasi berbagai isu kemaritiman di wilayah Indo-Pasifik, termasuk perbatasan laut Indonesia dan Australia serta masalah lingkungan laut. Salah satu poin penting dalam pertemuan Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action adalah komitmen Pemerintah Indonesia dan Australia untuk mengembangkan rencana aksi guna mendukung realisasi tujuan khususnya isu pencemaran lingkungan.

Kata kunci: Indonesia-Australia, IMO, PBB, Plan of Action, Lingkungan Laut Bersih.

LATAR BELAKANG

Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organisasi internasional yang memiliki hak istimewa dan berpengaruh dalam membuat dan menentukan hukum internasional. Organisasi tercipta karena adanya kedekatan antar negara yang mempunyai sebuah kesamaan, dan tujuan bersama untuk negara mereka masing masing. PBB memiliki peranan yang cukup besar dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas oleh karena itu untuk menjalankan tugasnya berdasarkan tujuan pendiriannya sesuai dengan Piagam PBB :

1. Pasal 57 *“Semua Anggota berjanji untuk mengambil tindakan bersama dan terpisah bekerja sama dengan Organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 55. dan*

2. Pasal 63 *“1). Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mengadakan perjanjian dengan badan-badan mana pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yang menetapkan syarat-syarat yang menjadi dasar hubungan badan tersebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Persetujuan-persetujuan tersebut harus mendapat persetujuan dari Majelis Umum. 2). Badan ini dapat mengkoordinasikan kegiatan badan-badan khusus melalui konsultasi dan rekomendasi kepada badan-badan tersebut dan melalui rekomendasi kepada Majelis Umum dan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹*

Salah satunya ialah, Organisasi Maritim Internasional (IMO) adalah salah satu lembaga khusus yang dibentuk dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). IMO didirikan oleh PBB pada tahun 1948 di Jenewa dan diberi mandat untuk merumuskan serta mengawasi peraturan internasional.l yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan pada sektor maritim. bukan hanya mencakup keselamatan pelayaran, mencegah pencemaran laut dan mengatur berbagai hal mengenai transportasi maritim internasional, tetapi IMO juga berisi peraturan dan standar Internasional. IMO memiliki 174 Negara anggota termasuk Indonesia dan Australia. Salah satu visi organisasi ini juga berupaya memastikan bahwa transportasi maritim internasional bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam hal kerja sama Internasional antar anggota IMO dalam hal keselamatan pelayaran, dan pencegahan pencemaran laut agar terciptanya lingkungan laut yang aman dan bersih.

Untuk merealisasikan salah satu visi dalam International Maritime Organization (IMO) ialah dengan mengadakan kerja sama dalam penelitian ini ialah Indonesia dan Australia. Pada tahun 2008 kerjasama antara Indonesia dan Australia telah berlangsung dengan sukses. Kedekatan hubungan antara kedua negara ini terutama mencakup aspek keamanan laut, dengan fokus pada Indonesia dan Australia bekerja sama di bidang kemaritiman (Maritime

¹ <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text> Isi Pasal Piagam PBB diakses pada tanggal 20 September 2023

Cooperation) merupakan inisiatif dari Indonesia kepada Australia karena meningkat adanya kesadaran yang memiliki potensi demi keamanan laut Indonesia-Australia. Kerja sama yang terjalin memang teguh dan berpatokan pada prinsip perjanjian kerja sama sebelumnya yaitu, Plan of Action on Maritime Cooperation. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat menandatangani hal ini untuk kepentingan bersama di bidang maritim. Ada 9 poin yang dibahas pada kerja sama ini yaitu,

1. Pengembangan ekonomi, konektivitas laut, dan 'Ekonomi Biru'. Australia dan Indonesia memahami signifikansi kerjasama berkelanjutan dalam perdagangan laut dan perkembangan kerjasama ini.

2. Peningkatan Kapabilitas Pertahanan Laut dan Langkah-langkah untuk Mengatasi Kejahatan Transnasional di Wilayah Indo-Pasifik. Dalam hal ini isu-isu penting dalam kerja sama regional dan internasional untuk menjaga keamanan dan kestabilan di wilayah ini.

3. Upaya Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal. Kedua negara ini melihat permasalahan penangkapan ikan secara ilegal sebagai bentuk permasalahan yang membutuhkan kebijakan yang dilakukan dengan cara mengadakan kerja sama bilateral, multilateral, regional dan internasional.

4. Meningkatkan Keamanan Maritim dan Melindungi Lingkungan Maritim Indonesia dan Australia akan berkontribusi positif terhadap upaya global untuk menjaga sumber daya laut dan ekosistem yang rentan.

5. Peningkatan Koordinasi dan Manajemen Risiko Bencana Maritim. Kerjasama antara Indonesia dan Australia memiliki potensi besar dalam mengatasi ancaman bencana alam di perairan yang mereka bagi.

6. Kerjasama dalam Peningkatan Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Maritim. Kerja sama ini berdampak positif dalam memajukan sektor maritim. Membantu menciptakan inovasi, meningkatkan keberlanjutan lingkungan maritim, dan memajukan ekonomi kedua negara. Hal ini juga dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam memahami, melindungi, dan mengelola sumber daya laut yang sangat penting.

7. Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya di Wilayah Kelautan dan Konservasi Karbon Laut. Kerja sama Indonesia-Australia dalam hal ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua negara, wilayah Indo-Pasifik, serta lingkungan global. Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi regional dan internasional dalam menjaga sumber daya laut dan ekosistem pesisir.

8. Pengelolaan Warisan Budaya Maritim. Kerja sama Indonesia-Australia dalam pengelolaan warisan budaya maritim akan memperkaya pengalaman budaya masyarakat di kedua negara, serta memastikan bahwa warisan maritim yang kaya dan beragam di wilayah mereka tetap terjaga dan relevan.

9. Menghasilkan interaksi dialog yang berlimpah, baik dalam wadah regional maupun forum multilateral. Kerja sama dalam dialog regional dan forum multilateral memungkinkan Indonesia dan Australia untuk berkontribusi secara positif dalam membentuk kebijakan dan mengejar solusi bersama terkait dengan berbagai isu penting di tingkat regional dan global.²

Plan of Action ini menggambarkan hubungan kerja sama Indonesia dan Australia dalam mewujudkan salah satu visi International Maritime Organization khususnya pencemaran lingkungan laut dan mewujudkan lau bersih seperti kawasan Indo Pasifik. Kerja sama ini merupakan upaya yang berkelanjutan dan dapat mengalami perkembangan dan perluasan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan maritim yang kokoh antara Indonesia dan Australia dalam menjaga keamanan, melindungi lingkungan laut, dan mengelola sumber daya maritim secara berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kerja sama Indonesia dan Australia terkait upaya dalam mewujudkan lingkungan laut bersih. Hal ini tentunya menarik peneliti untuk mengkaji isu maritim dari Negara Indonesia dan Australia. Dengan informasi yang telah diberikan, dapat disusun sebuah penelitian yang dikaji lebih lanjut yaitu: “Mengapa Indonesia dan Australia melakukan upaya kerja sama dalam merealisasikan laut bersih dalam mewujudkan visi international Maritime Organization (IMO) dalam bidang lingkungan kemaritimanya?”

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

² Aditya Mardiasuti, “Ini 9 Poin Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia,” Detik News, 16 Maret, 2018, <https://news.detik.com/berita/d-3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia> diakses pada 22 September 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap masalah yang diteliti. Dalam proses penelitian ini, Metode penggalian informasi yang diterapkan adalah analisis literatur, yang melibatkan analisis berbagai sumber data yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah di internet, serta informasi yang diperoleh dari media massa dan platform internet lainnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengedepankan analisis dan menekankan proses pemahaman. Pendekatan ini bertujuan memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hubungan Indonesia dan Australia

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Australia telah berkembang selama berabad-abad, dimulai sejak zaman kolonial. Selama Perang Dunia II, Australia dan Indonesia (saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda) berada di pihak yang berbeda. Pada tahun 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, dan ini memunculkan kedua negara, Indonesia dan Australia, telah menjalin hubungan diplomatik resmi. Sebuah momen bersejarah yang memegang peranan penting dalam perkembangan hubungan bilateral antara keduanya. Pada tahun 1949, Indonesia dan Australia menjalin hubungan diplomatik dengan pembukaan kedutaan besar di Canberra dan Jakarta. Ini mengawali kerja sama diplomatik resmi antara kedua negara. kemudian Pada tahun 1973, Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Perdagangan dan Hubungan Ekonomi (Indonesia-Australia Economic and Trade Cooperation Agreement). Perjanjian ini mengatur kerja sama ekonomi antara kedua negara Hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan Australia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Australia telah menjadi donor pembangunan penting bagi Indonesia selama beberapa dekade. Bantuan pembangunan mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. dengan kedua negara bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, keamanan, kemaritiman dan kerja sama pembangunan.

Salah satu kerja sama Indonesia dengan Australia pada bidang kemaritiman Hal ini sudah terjalin sesuai dengan kesepakatan pada "*Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and the Government of Australia*". Kedua negara ini telah bekerja sama dalam berbagai inisiatif maritim, termasuk penangkapan ikan ilegal, keamanan maritim, dan pemantauan lingkungan laut.

Tujuan Kerja Sama Indonesia dengan Australia

Kerja sama yang dilakukan Indonesia merupakan strategis Indonesia dalam melakukan diplomasi publik oleh Indonesia terhadap Australia. Berdasarkan visi politik luar negeri Indonesia yang berfokus pada terealisasinya kepentingan negara dengan asas fungsional.³ Kerja sama antara Indonesia dan Australia memiliki potensi untuk memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Hubungan pertemanan yang dijalin oleh Indonesia kepada Australia berdampak pada potensi kedua negara ini dalam mengoptimalkan kepentingan yang memiliki kesamaan seperti, letak geografis sehingga mempengaruhi berbagai aspek khususnya pada sektor kemaritiman.

Kedua negara ini merupakan anggota aktif dalam berbagai forum regional dan multilateral, seperti International Maritime Organization (IMO). Mereka bekerja sama dalam mengatasi isu-isu kemaritiman bersama yang ada di Indo Pasifik terutama perbatasan laut Indonesia dan Australia. Keuntungan bagi Indonesia adalah dapat bekerja sama dalam penegakan hukum maritim dan keamanan laut untuk menjaga perairan regional yang aman dan stabil, yang berkontribusi pada kepentingan keamanan Indonesia begitupun bagi Australia. Selain itu, kerja sama dalam keamanan maritim dan lingkungan dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya di laut dan ekosistem laut yang penting bagi Indonesia. Ini termasuk penangkapan ikan ilegal dan pemantauan lingkungan laut.

Prespektif Indonesia dan Australia dalam Bidang Maritim

Konteks maritim identik dengan masyarakat yang memiliki budaya dan kebiasaan dengan lingkungan laut. Negara maritim itu sendiri dapat diistilahkan digunakan dalam menggambarkan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan laut ataupun perairan, seperti berbatasan dengan laut, hukum laut, perdagangan laut⁴, lingkungan laut, hingga pelaut. Indonesia dikategorikan sebagai negara maritim sebagian besar wilayah laut atau perairan yang lebih luas dibandingkan daratannya. Secara hukum Internasional dengan merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, Indonesia dinyatakan memiliki status sebagai negara maritim dan kepulauan yang telah diakui secara internasional.

³ <https://hubla.dephub.go.id/home/page/kerjasama-luarnegeri> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

⁴ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6859129/maritim-adalah-pengertian-ciri-serta-contoh-negara-maritim-dan-keuntungannya> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Bagi Australia dalam melihat prespektif maritim tentunya menjadi hal yang penting untuk negaranya, sesuai dengan letaknya, negara ini memiliki garis pantai yang panjang. Faktor tersebut menjadi alasan berbagai kepentingan maritim negara Australia. Pada kasus negara Indonesia dan Australia dapat dilihat secara fungsional, garis batas negara berfungsi untuk memisahkan beberapa hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah. Garis batas merupakan tolak ukur dalam mengidentifikasi adanya hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban negara dapat timbul berdasarkan hubungan hukum ketika negara memiliki persamaan terhadap perbatasan dengan wilayahnya, seperti misalnya lingkungan masyarakat suatu negara.

Perlindungan Pelestarian Lingkungan Laut Internasional

Berdasarkan konsep hukum laut internasional yang tertinggi, yakni hukum yang disepakati dibawah persetujuan PBB yang dikenal UNCLOS tahun 1982, dalam konteks pelestarian lingkungan laut, didefinisikan bahwa pencemaran adalah tindakan manusia yang secara langsung maupun tidak langsung memasukkan bahan atau energi ke dalam lingkungan laut. Tindakan ini mengakibatkan dampak kerusakan pada keanekaragaman hayati dan biota laut, membahayakan faktor kesehatan, mengganggu berbagai kegiatan di laut hukum ini menggambarkan konsep tersebut.

Hukum Laut Internasional mencakup regulasi untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Setiap negara harus bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa aktivitas yang berada dalam yurisdiksi atau pengawasannya dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dampak negatif akibat pencemaran dari negara lain terhadap lingkungan. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki kedaulatan berupaya keras untuk mempertahankan integritas wilayah laut mereka. Mereka telah mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih ada risiko insiden atau kelalaian yang dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan. Sehingga pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk sebuah badan yang fokus pada urusan maritim yang disebut International Maritime Organization (IMO).

Berdasarkan Hukum Laut Internasional Negara-negara yang tergolong sebagai negara maju mempunyai kewajiban memberikan dukungan kepada negara berkembang dalam usaha melestarikan dan melindungi ekosistem laut. Bantuan ini mencakup penyelenggaraan pelatihan untuk para ahli dan ilmuwan, serta ikut serta dalam proyek-proyek internasional, serta dukungan dalam ketersediaan. Peralatan yang diperlukan, bimbingan dalam pembuatan alat-

alat yang dibutuhkan, serta pendukung Dalam pengembangan penelitian, pemantauan, pendidikan, dan program lainnya, organisasi internasional perlu memberikan perhatian istimewa kepada negara berkembang dalam penyaluran sumber dana dan bantuan teknis, serta dalam pengaplikasiannya, dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi, dan memonitor dampak lingkungan laut. Sebab semua negara memiliki tanggung jawab yang setara untuk berkolaborasi dalam usaha pelestarian, perlindungan, dan pemulihan ekosistem bumi. Hal ini harus mempertimbangkan perbedaan peran antara negara maju dan negara berkembang. Ini juga berlaku untuk upaya perlindungan lingkungan laut. Sehingga pada penelitian ini bentuk kerja sama Indonesia dan Australia merupakan perlindungan pelestarian lingkungan laut Internasional.

International Maritime Organization (IMO)

Organisasi Maritim Internasional (IMO) merupakan badan khusus yang dibentuk dan berada dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara susunan peraturan komprehensif untuk kegiatan pelayaran di seluruh dunia. Hasilnya adalah serangkaian konvensi internasional yang komprehensif, hal ini mengatur setiap bidang kelautan melibatkan beragam aspek, seperti keselamatan, permasalahan lingkungan, aspek hukum, kerjasama teknis, keamanan maritim, dan optimalisasi pelayaran.⁵ Perjanjian-perjanjian yang terdapat pada IMO diantaranya, Perjanjian Internasional untuk Menjaga Keselamatan di Laut (SOLAS), Perjanjian Internasional untuk Mencegah Polusi dari Kapal (MARPOL), dan Perjanjian Internasional mengenai Persyaratan Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan Pelaut (STCW).Markas besar IMO berlokasi di London, Inggris, dan saat ini memiliki keanggotaan yang terdiri dari 174 negara serta tiga anggota asosiasi.

Program Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action antara Indonesia dan Australia dalam Merealisasikan Laut Bersih

Indonesia dan Australia memiliki peran besar yang sangat signifikan apabila dilihat dari segi kerja sama bilateral, regional, dan Internasional. Hal ini dengan terealisasinya kerja sama yang bukan hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi hal ini juga mendukung terwujudnya tujuan PBB. Pada penelitian ini Indonesia dan Australia memiliki keberhasilan

⁵ <https://www.dco.uscg.mil/IMO/International-Maritime-Organization-Sub-committees-HWT/> diakses pada tanggal 30 September 2023

dalam berkontribusi pada International Maritime Organization (IMO). Kedua negara ini tentunya mempunyai keterkaitan dan kesamaan dalam memainkan peran mereka pada organisasi IMO, sebab Indonesia dan Australia berbatasan dengan Lautan Hindia.

Secara geografis, Lautan Hindia terletak di antara Indonesia, yang merupakan kepulauan terbesar di dunia, dan Australia, yang merupakan benua sendiri. Batas antara kedua negara ini adalah perbatasan maritim di Lautan Hindia, yang memisahkan pulau-pulau Indonesia yang lebih timur dan utara dari Australia yang lebih selatan dan barat. Lautan Hindia adalah perairan penting dalam hubungan geografis antara Indonesia dan Australia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dan Australia menginginkan wilayah maritim yang damai, aman, dan stabil agar masyarakat terhindar dari perdangangan manusia, dan lingkungan hidup.

Hal ini direalisasikan melalui deklarasi bersama yang berisi poin poin penting berikut:

- a. Prinsip prinsip berdasarkan isi deklarasi bersama (Indonesia-Australia) sesuai dengan perjanjian tentang kerangka kerja sama keamanan (Perjanjian Lombok) pada tanggal 13 November 2006 hal ini juga termasuk rencana aksi.
- b. Mengkaji pentingnya perdangangan maritim dan ekonomi biru bagi kesejahteraan Indonesia dan Australia.
- c. Kepentingan bersama dalam pengembangan konektivitas maritim
- d. Kekuatan kerja sama maritim yang berkelanjutan

Hal ini ditegaskan kembali oleh Indonesia dan Australia, yang berkomitmen terhadap perdagangan yang sah tanpa hambatan, kebebasan navigasi dan penerbangan serta pemanfaatan sumber daya hayati laut secara berkelanjutan sesuai dengan hukum internasional. Memelihara dan memajukan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik, dan penyelesaian sengketa maritim secara damai sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan berkomitmen untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional yang dilakukan di laut. Pemerintah akan bekerja untuk meningkatkan serta meluaskan relasi di sektor kelautan.

Program **Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action antara Indonesia dan Australia** adalah program maritim yang memuat tujuan berikut.

1. Bersama-sama bekerja untuk meningkatkan pengelolaan dan kelangsungan sumber daya hayati di lautan;;
2. Meningkatkan kerjasama dalam mengatasi penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak terdokumentasikan, dan tidak diawasi, serta tindakan kriminal dalam industri perikanan;

3. Menggalakkan peningkatan fasilitas kelautan dan peningkatan jaringan konektivitas regional guna mendukung kelancaran perdagangan di laut, investasi, layanan, dan sektor pariwisata;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dengan menciptakan peluang pekerjaan baru melalui pengembangan keterampilan dan kapabilitas.
5. Berkolaborasi untuk meningkatkan struktur keamanan maritim di wilayah kami, yang mencakup pertukaran informasi yang relevan terkait pemeliharaan keamanan maritim.
6. Berupaya bekerja bersama, baik melalui jalur kerjasama bilateral maupun regional, untuk meningkatkan keselamatan di laut dan memperkuat tekad serta langkah-langkah dalam mencegah serta merespons ancaman terkait dampak pencemaran lingkungan laut.
7. Untuk memperbaiki koordinasi serta komunikasi dalam upaya pencarian dan penyelamatan, serta meningkatkan kapabilitas kita dalam merespons insiden-insiden penerbangan dan laut.
8. Untuk peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam pencarian dan penyelamatan serta perbaikan kapabilitas untuk menanggapi insiden penerbangan dan maritim di laut kita, serta manajemen risiko bencana;
9. Untuk meningkatkan lingkungan peraturan keamanan pelabuhan dan kapal yang aman;
10. Menguatkan hubungan antar angkatan laut , termasuk melalui berbagai upaya kerjasama.
11. Untuk meningkatkan kolaborasi yang lebih kokoh di antara instansi-instansi penegak hukum maritim melalui pertukaran data, peningkatan kemampuan, dan eksekusi proyek kerjasama bilateral.
12. Untuk melawan kejahatan terorganisasi yang menyeberang batas negara yang terjadi di perairan melalui meningkatkan kolaborasi dan pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum dan sistem peradilan.
13. Untuk memperkuat kerja sama dalam penelitian tentang kelautan dan berkolaborasi dalam bidang ilmu kelautan.
14. Untuk meningkatkan kerja sama dalam penelitian kelautan dan berkolaborasi dalam bidang ilmu kelautan.
15. Untuk mengintensifkan kolaborasi dalam pendidikan dan penelitian mengenai keselamatan dan keamanan maritim, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan.

16. Untuk berupaya bersama dalam meningkatkan kolaborasi dalam rangka melestarikan kekayaan budaya maritim, dengan mematuhi undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku.

17. Kerjasama dalam lingkungan regional dan multilateral dengan tujuan memajukan kepentingan bersama serta komitmen dalam konteks maritim.

Pemerintah bertekad untuk menyusun Rencana Aksi guna mendukung pelaksanaan sasaran-sasaran ini.. Salah satu poin yang terdapat pada deklarasi ini yang menjadi bahan kajian penulis ialah meningkatkan tingkat keselamatan di perairan dan mengintensifkan tekad serta usaha mereka dalam mencegah serta menangani ancaman terhadap lingkungan laut akibat pencemaran. Program ini menjadi upaya pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan pencemaran lingkungan lau agar terealisasinya lingkungan laut Internasional yang bersih.

Dalam kerangka program kerjasama yang akan datang, Indonesia sedang mengkaji masalah yang terkait dengan Penggunaan Self-Propelled Oil Barge (SPOB) oleh Australia, terutama dalam konteks transportasi bahan bakar dan produk minyak ke daerah-daerah terpencil, menjadi semakin krusial sejalan dengan perkembangan wilayah terpencil di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia mendapat dukungan dari Australia dalam bentuk peningkatan kapasitas, yang mencakup pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan. Hal ini dilakukan Indonesia untuk konteks isu pencemaran lingkungan, Indonesia mengharapkan agar Australia bisa menerapkan prinsip-prinsip manajemen air balas yang berkelanjutan. Usulan ini didasarkan pada kesadaran bahwa permasalahan air di satu negara dapat berpengaruh pada negara-negara tetangga. Australia, yang telah memiliki sejarah panjang dalam mengatur manajemen air balas, dapat menjadi model untuk mendorong penerapan pendekatan serupa. Dengan terealisasinya laut yaang aman dan bersih Indonesia dikatakan sebagai negara yang berhasil dalam mewujudkan visi International Maritie Organization.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kerjasama bilateral yang dijalin oleh kedua Negara ini adalah demi kepentingan nasional dari masing-masing Negara.namun dibalik kepentingan itu terdapat peran perserikatan PBB dalam mendukung organisasi kemaritiman dalam hal ini Maritime InternationalOrganization (IMO). Sejak tahun 2005 sampai saat ini Indonesia dan Australia tampak konsisten menjalin kerjasama di bidang maritim. Kedua negara ini telah bekerja sama dalam berbagai inisiatif maritim, termasuk penangkapan ikan ilegal, keamanan maritim, dan pemantauan lingkungan

laut. Melalui “Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action” antara Indonesia dan Australia menjadi kerja sama komprehensif yang menanggulangi permasalahan yang meliputi isu-isu kemaritiman bersama yang ada di Indo Pasifik terutama perbatasan laut Indonesia dan Australia. Keuntungan bagi Indonesia adalah dapat bekerja sama dalam penegakan hukum maritim dan keamanan laut untuk menjaga perairan regional yang aman dan stabil, yang berkontribusi pada kepentingan keamanan Indonesia begitupun bagi Australia. Selain itu, kerja sama dalam keamanan maritim dan lingkungan dapat membantu menjaga keberlanjutan Aset laut dan ekosistem laut yang penting bagi Indonesia. Ini termasuk penangkapan ikan ilegal dan pemantauan lingkungan laut.

Indonesia dan Australia, melalui kerja sama bilateral dan regional, bekerja sama untuk meningkatkan keselamatan di perairan dan memperkuat tekad serta usaha mereka dalam mencegah serta menangani ancaman lingkungan yang berasal dari pencemaran laut. Oleh karena itu, dalam pertemuan Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action, salah satu poin pentingnya adalah membahas komitmen Pemerintah Indonesia dan Australia dalam merancang rencana tindakan yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan isu pencemaran lingkungan.

Saran

Untuk Terwujudnya kerja sama antara kedua negara tidak terbatas hanya pada sektor maritim, tetapi juga melibatkan berbagai bidang, terutama dalam konteks perubahan lingkungan yang harus diperdalam. Melihat riwayat hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia yang telah mengalami pasang surut, penting bagi keduanya untuk menjaga hubungan yang harmonis. Ini tidak hanya bertujuan untuk memelihara hubungan yang baik antara kedua negara, tetapi juga untuk membangun saling kepercayaan. Selain manfaat nasional yang dapat diperoleh oleh kedua negara, kerjasama yang solid ini akan membawa dampak positif yang signifikan, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Berridge, G.R, & James, A. (2003). *A Dictionary of Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan

Susanto, & Munaf, D. (2015). *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Kelley, R. P. 2011. "UNCLOS, but No Cigar: Overcoming Obstacles to the Prosecution of Maritime Piracy". *Minnesota Law Review*, 95 (6). 2285-2317

Sofyan, Ahmad. 2010. "Tanggung Jawab dalam Pencemaran Laut yang Disebabkan Minyak Menurut Hukum Internasional". *Înspirasi*. 1 (10).139- 164.

Suárez-de Vivero, J. L. 2013. "The Extended Continental Shelf: A Geographical Perspective of the Implementation of Article 76 of UNCLOS". *Ocean & Coastal Management*. 73. 113-126.

Website

Isi Pasal Piagam PBB diakses pada : <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text> diakses pada tanggal 20 September 2023

IMO. (n.d.). Organisasi Maritim Internasional. diakses pada: <http://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritime.asp> tanggal 25 September 2023

Aditya Mardiasuti, "Ini 9 Poin Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia," *Detik News*, 16 Maret, 2018, <https://news.detik.com/berita/d-3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia> diakses pada 22 September 2023

Penelitian Kualitatif diakses <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-MetodePenelitian-Kualitatif.html> pada tanggal 25 September 2023.

Dinas Perhubungan diakses pada <https://hubla.dephub.go.id/home/page/kerjasama-luarnegeri> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Pengertian Maritim diakses pada: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6859129/maritim-adalah-pengertian-ciri-serta-contoh-negara-maritim-dan-keuntungannya> pada tanggal 10 Oktober 2023

Hukum Laut diakses pada: <https://www.neliti.com/id/publications/152580/implementasi-ketentuan-ketentuan-united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea> tanggal 30 September.

IMO diakses pada: <https://www.dco.uscg.mil/IMO/International-Maritime-Organization-Subcommittees-HWT/> tanggal 30 September 2023